

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah merupakan salah satu masalah besar di banyak negara yang sedang berkembang. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat di terima oleh suatu sistem social tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki perbedaan karakteristik dan keanekaragaman yang tinggi baik meliputi budaya, suku bangsa, bahkan sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah yang tentunya berbeda-beda dari Sabang hingga Merauke. Sebagai salah satu Negara Sedang Berkembang (NSB), dalam proses pembangunannya, Indonesia pasti memiliki berbagai masalah yang harus dibenahi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ketimpangan pendapatan antar daerah masih merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri selama tidak menentang ketentuan dalam Undang-Undang. Meskipun memang dalam kenyataannya bahwa ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi (Agus Naufal,2010). Seperti yang diuraikan pula oleh Arief dan Yundy (2010:196), bahwa usaha untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan sangatlah sulit.

Sulawesi merupakan pulau yang berada di tengah Kepulauan Maluku dan Pulau Kalimantan. Sulawesi adalah pulau yang terbesar ke-11 di dunia yang terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Berikut ini tabel Ratio Gini antar Provinsi di Sulawesi

Tabel 1.1
Gini Ratio Antar Provinsi Di Sulawesi TAHUN 2015-2019

| Provinsi | Gini Ratio | | | | |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Utara | 0.366 | 0.379 | 0.394 | 0.372 | 0.376 |
| Sulawesi Tengah | 0.370 | 0.347 | 0.345 | 0.317 | 0.330 |
| Sulawesi Selatan | 0.404 | 0.400 | 0.429 | 0.388 | 0.391 |
| Sulawesi Tenggara | 0.381 | 0.388 | 0.404 | 0.392 | 0.393 |
| Gorontalo | 0.401 | 0.410 | 0.405 | 0.417 | 0.410 |
| Sulawesi Barat | 0.362 | 0.371 | 0.339 | 0.366 | 0.365 |

Sumber :BPS pusat statistic

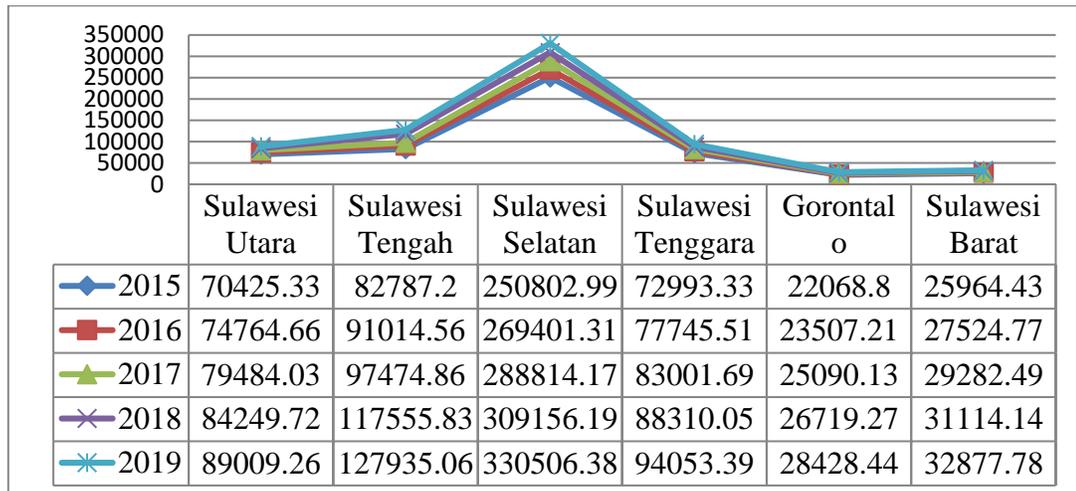
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perkembangan Gini Ratio Sulawesi dari tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2017 gini ratio yang ada pada provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.429 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan sedang.

Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak positif yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan ekstrim antara lain adalah melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas , serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, tidak terlepas hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Selain itu, menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2006:423). Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan rill masyarakat pada tahun sebelumnya.

Salah satu indicator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat PDRB. Badan

Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2019.



Sumber :BPS pusat statistic

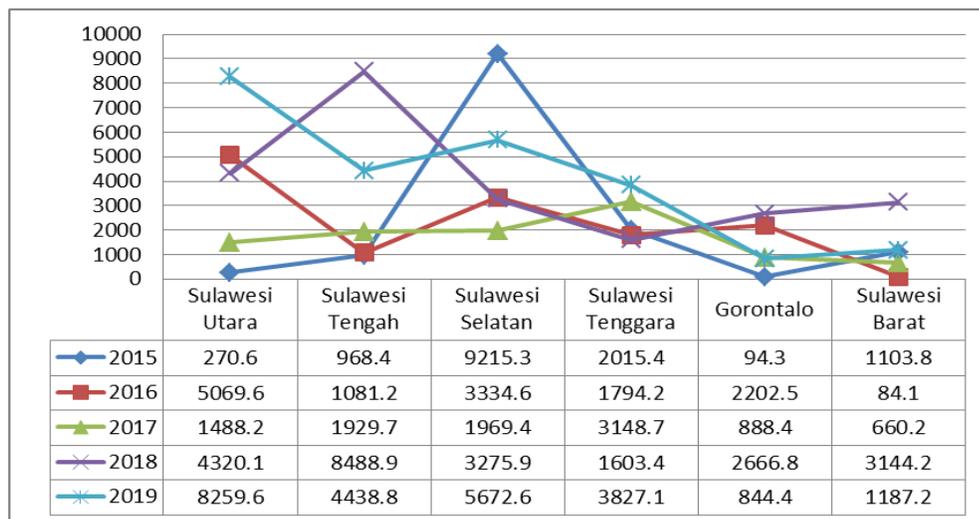
Gambar 1.1: PDRB antar provinsi di Sulawesi Atas Harga Konstan tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 2015-2019 ada pada provinsi Sulawesi Selatan sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada pada provinsi Gorontalo. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi di provinsi di Gorontalo dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang dari daerah itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari daerah lain (faktor eksternal).

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan invstasi baik dari dalam negeri maupun diluar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat. Sehingga

tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli.

Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terjadi karena sebagian investasi swasta terpusat hanya di beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sebagai tempat berinvestasi. Gambar 1.2 merupakan grafik perkembangan investasi antar Provinsi di Sulawesi pada tahun 2015-2019



Sumber :BPS pusat statistic

Gambar 1.2 : Investasi antar provinsi di Sulawesi pada tahun (Milyar Rupiah)2015-2019

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat kita lihat bahwa investasi antar provinsi di Sulawesi cenderung meningkat namun fluktuatif yang artinya peningkatan investasi tidak selalu naik namun pada tahun-tahun tertentu ada penurunan. Perkembangan investasi biasanya yang cenderung meningkat tentunya di pengaruhi berbagai faktor baik dari kondisi lokasi, SDA maupun SDM diwilayah tersebut. Pada tahun 2015 tingkat investasi tertinggi ada pada provinsi Sulawesi Selatan.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat atau sering dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat membuat pembangunan ekonomi dikatakan berhasil. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk. Permasalah yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah atau wilayah.

Berdasarkan Data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2019 pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerataan IPM atau di kenal dengan *Human Development Index* (HDI) Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan pertama dengan IPM pada tahun 2015 sebesar 70.39 dan pada tahun 2019 sebesar 72.99.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Antar Provinsi Di Sulawesi Tahun 2015-2019

| Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sulawesi Utara | 70.39 | 71.05 | 71.66 | 72.20 | 72.99 |
| Sulawesi Tengah | 66.76 | 67.47 | 68.11 | 68.88 | 69.50 |
| Sulawesi Selatan | 69.15 | 69.76 | 70.34 | 70.90 | 71.66 |
| Sulawesi Tenggara | 68.75 | 69.31 | 69.86 | 70.61 | 71.20 |
| Gorontalo | 65.86 | 66.29 | 67.01 | 67.71 | 68.49 |
| Sulawesi Barat | 62.96 | 63.60 | 64.30 | 65.10 | 65.73 |

Sumber :BPS pusat statistic

Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah alat untuk mengukur ketimpangan. Terdapat tiga indicator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indicator saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktro pendukung lainnya, seperti infrastruktur, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu merata, ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang serius. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat,

Kemudian adanya alokasi investasi yang tidak merata di beberapa daerah, Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda antar daerah alhasil akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapat antar daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu di analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka di ambil judul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Sulawesi**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Sulawesi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan daerah agar dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.

- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang di dapatkan di bangku kuliah dengan fakta yang ada langsung di lapangan.